

Judul : Ketua Fraksi Nasdem Dilaporkan ke Polisi
Tanggal : Sabtu, 05 Agustus 2017
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 2

Ketua Fraksi NasDem Dilaporkan ke Polisi

Pernyataan Victor Laiskodat Dinilai Rawan Memicu Konflik

JAKARTA—Pernyataan politikus Partai NasDem Viktor Laiskodat tentang empat partai politik (parpol) sebagai pendukung gerakan intoleran dan pro-khilafah berbuntut panjang.

Sejumlah pengurus parpol melaporkan ketua Fraksi Partai NasDem di DPR tersebut ke Bareskrim Polri, kemarin.

Pernyataan Viktor diduga mengandung ujaran kebencian dan permusuhan yang dapat memicu konflik anak bangsa. Viktor juga diduga telah melakukan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau tentang penghinaan dan kejahatan tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis

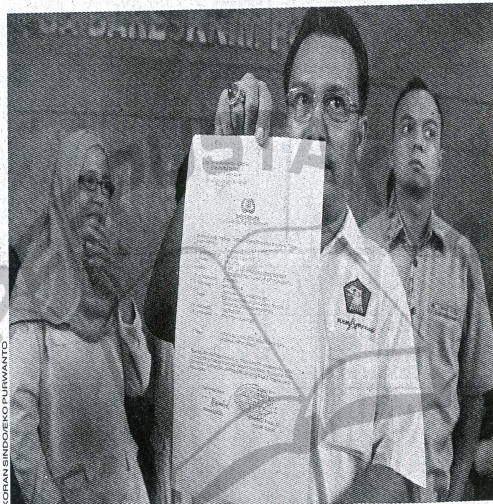
"Kami hanya menyerahkan bukti-bukti untuk melaporkan Viktor. Kami menyertakan video pidato yang disampaikan Viktor, kemudian dari beberapa berita di online juga kami sertakan semua sebagai alat bukti," kata Ketua DPP Gerindra Iwan Sumule di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta, kemarin.

Dalam pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Viktor menyebut Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat sebagai partai anti-Pancasila dan mendukung khilafah. Itu disampaikan

di acara deklarasi calon bupati di Tulus, Kabupaten Kupang pada 1 Agustus 2017. Hal itu terungkap dari video penggalan pidato Viktor di NTT yang tersebar di media sosial (medsos).

Perbuatan Viktor diduga melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 19/2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU Nomor 1/1946 tentang KUHP 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Pasal 4 dan 16, Pasal 156 dan Pasal 156A.

Selain pengurus Gerindra, laporan yang sama juga dilakukan DPP PAN bersama Barisan Muda (BM) PAN. Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan HAM DPP PAN, Surya I Wahyu mengatakan, banyak pernyataan Viktor yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Pernyataan itu dinilai mengandung ujaran kebencian dan permusuhan yang dapat memicu konflik di masyarakat.



Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule menunjukkan surat pengaduan di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, kemarin. Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN) melaporkan Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri terkait pidato Viktor yang menyebutkan sejumlah partai politik sebagai pendukung gerakan intoleran dan khilafah.

"Ini perlu diluruskan dengan laporan polisi," ujar Surya di Gedung Bareskrim Mabes Polri, kemarin.

Menurut dia, laporan tersebut sudah berdasarkan saksi yang melihat. Namun, cuplikan pidato juga dijadikan bukti untuk melaporkan Viktor.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman meminta Viktor diberikan hukuman yang berat atas pernyataan kontroversial-

nya tersebut. Sohibul menilai pidato Viktor provokatif, menebarkan permusuhan, dan fitnah. "Ini harus diproses secara hukum dan etika dengan hukuman yang berat," ujar Sohibul di Jakarta kemarin.

Menurut dia, Viktor dianggap berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Dia meminta jangan sampai jiwa rasis dan insinuatif elite seperti ini menular kepada masyarakat luas. Dia mengaku sulit memba-

yang kondisi psikologis elite partai politik seperti Viktor Laiskodat karena dinilai telah melampaui kewajaran manusia Indonesia.

"Semoga ini kasus terakhir, dan kita berharap semua elite (politik) mawas diri demi keutuhan negara bangsa yang kita cintai," ucapnya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidikk menegaskan apa yang disampaikan Viktor jelas

menebarkan sikap kebencian karena sudah menuding empat partai besar mendukung adanya kelompok intoleran. Menurut dia, apa yang dilakukan Viktor adalah bentuk perbuatan buruk kepada orang atau kelompok yang didasari kebencian akibat perbedaan politik.

"Tujuannya menghalangi korban berpartisipasi penuh dan bebas dalam kehidupan politik. Ini adalah cacat akal sehat untuk menempatkan rakyat yang tak bersetuju pada perppu tersebut (Perppu tentang Ormas)," ujar Rachland.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta polisi berani memproses hukum Viktor karena ucapannya dinilai telah memenuhi unsur pelanggaran hukum lengkap dengan saksi dan bukti.

"Saya kira harus berani ya. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian. Terlalu banyak catatan kita terhadap kepolisian pada sejumlah kasus," ujarnya kemarin.

Menanggapi laporan atas Viktor tersebut, DPP NasDem menilai tidak ada persoalan dengan muatan pidato tersebut. Pidato itu dinilai justru sebagai upaya untuk menjaga Pancasila dan UUD 1945.

"Kalau ada orang yang menuntut orang yang hendak menjaga Pancasila dan UUD

1945, maka kami harus mendukung pernyataan Viktor," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate, kemarin.

Dia meminta agar isi pidato itu tidak didegradasikan dengan kepentingan pragmatis. "Ini urusan negara, jangan diputar seolah-olah persekusi, adu domba dan lain-lain," katanya.

Menurut dia, partai politik yang tidak mendukung khilafah seharusnya mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (ormas). "Kalau menolak Perppu tersebut berarti yang diomongin Viktor benar dong," ungkapnya.

Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah sebelumnya juga melibatkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono. Pernyataannya yang menyebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sama dengan PKI karena sering menipu rakyat mendapat kecaman keras. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bahkan melaporkan Arief Poyuono ke Kepolisian. Setelah itu, Arief Poyuono pun meminta maaf secara tertulis

● rahmatsahid/
sindonews